SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811, 40817

Koran		Hlm
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang		
Posmetro	✓	4
.....		

Tahun : 2017			
Bulan			
Jan	✓	Jul	
Feb		Ags	
Maret		Sep	
April		Okt	
Mei		Nov	
Jun		Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

SPj Fiktif, Bukti Lemah Pengawasan

ARISTO MUNANDAR

PADANG, METRO

Aksi aparat sipil negara (ASN) yang membuat surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif di lingkungan Pemprov Sumbar, mengundang reaksi sejumlah anggota DPRD Sumbar, Rabu (11/1).

"Soal temuan SPJ fiktif adalah pukulan bagi Pemprov Sumbar. Ini merupakan pertanda bahwa sistem pengawasan, pengendalian keuangan dan administrasi pemerintahan masih lemah dan harus ditingkatkan, " ungkap Ketua Komisi I DPRD Sumbar Aristo Munandar, Selasa (10/1).

Aristo menegaskan, semua pelaku penyelewengan dana harus dihukum. Walaupun jumlah uangnya cuma Rp10 rupiah sekalipun. Perilakunya yang salah, tak masalah berapa banyak atau sedikit uangnya," tegasnya.

Seperti diketahui baru-baru ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, menemukan penyelewengan uang negara mencapai angka puluhan miliar rupiah, dengan modus SPJ fiktif.

Penyelewengan tersebut diduga dilakukan oknum staf Dinas PU dengan inisial "JSN" yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di SKPD tersebut.

Dengan cara memperbanyak dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan *Fly Over* di Kota Padang dari dana APBD 2015.

Aristo meminta, gubernur untuk mengintruksikan peningkatan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah di seluruh Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), termasuk diantara dinas, badan, biro dan sebagainya.

"Semua kepala SOPD dan struktur pejabat di semua instansi harus lebih teliti. Semua SPJ dan surat menyurat lainnya yang akan ditandatangani harus benar-benar diteliti dulu, jangan lagi sekadar main teken saja," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, untuk mengindari adanya eksekutif atau legislatif yang tersangkut penyalahgunaan anggaran pada 2017 sekarang, pengawasan akan ditingkatkan.

"Tahun 2016, kita agak lemah dalam pengawasan. Sehingga kasus penyalahgunaan anggaran rentan terjadi. Kita ingin, tahun 2017 tak ada lagi penyimpangan- penyimpangan. Karena itu pengawasan akan ditingkatkan," ujar Hendra, saat jumpa pers dengan wartawan, beberapa waktu lalu. (x)